

ABSTRAK

Putra Muhammad Zulfa, NIM 1223030089, Tahun 2026 yang berjudul **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Prinsip Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya)”**.

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pelayanan administrasi dan surat-menyurat. Pemerintah Desa Pagerageung menyediakan berbagai jenis pelayanan, salah satunya Surat Keterangan Usaha (SKU). Seiring perkembangan teknologi, pemerintah desa memanfaatkan website sebagai sarana informasi dan pendukung pelayanan administrasi. Namun, masyarakat masih cenderung memilih pelayanan secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian mengenai jenis dan mekanisme pelayanan serta penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik di Desa Pagerageung.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui jenis pelayanan publik yang dilakukan di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya; (2) menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* yang meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Desa Pagerageung; dan (3) menganalisis pelaksanaan pelayanan publik tersebut berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan teori Siyasah Dusturiyah, teori ini digunakan untuk melihat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai-nilai pemerintahan dalam Islam, terutama amanah, keadilan, maslahah, syūrā, dan tanggung jawab pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pelayanan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Pagerageung. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pagerageung menyelenggarakan berbagai pelayanan publik, terutama pelayanan administrasi dan surat-menyurat, termasuk pelayanan SKU. Pelayanan berbasis website telah digunakan untuk mendukung penyampaian informasi, publikasi kegiatan, transparansi APBDes, dan pelayanan administrasi, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan literasi digital masyarakat, kebiasaan pelayanan langsung, dan belum tersedianya anggaran operasional khusus. Prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah diterapkan, tetapi masih memerlukan peningkatan.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, *Good Governance*, Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, *Siyasah Dusturiyah*.